

**PERILAKU PERNIKAHAN JANDA DI KAMPUNG KAPAU KENAGARIAN  
KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Keluarga**



*Oleh,*

**FAIRIA HAMDANI**  
**NIM. 312. 221**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H/2018 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERILAKU PERNIKAHAN JANDA DI KAMPUNG KAPAU KENAGARIAN KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN" yang disusun oleh Fajria Ramdani, NIM 312.221 prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Padang, 18 Januari 2018

Pembimbing I

**Drs. Aditiawarman AD, M.Ag**  
NIP: 19540315 198103 1 005

Pembimbing II

**Dr. Elfia, M.Ag**  
NIP: 19790317 200501 2 006

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Perilaku Pernikahan Janda Di Kampung Kapau Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.** Ditulis oleh. **Fajria Hamdani. Nim. 312.221.** Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya. Pengulangan nikah yang menggambarkan situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya pernikahan ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya pada pernikahan yang pertama tidak dengan wali yang sah, dan tidak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah janda dan bagaimana status akta nikah jika terjadi *pengulangan* akad nikah janda di hadapan pegawai pencatat akta nikah kantor urusan agama (PPN-KUA). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam serta dilakukan dengan hasil wawancara yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah janda secara hukum *syar’i* pelaksanaan akad nikah janda, karena sudah terpenuhi rukun dan syarat-syarat dari pernikahan tersebut tidak memiliki buku akta nikah tidak tercatat dalam buku catatan sipil, sehingga dilakukan pengulangan akad nikah dengan alasan kehati-hatian (*ihthyath*), walaupun tidak batal, agar terhindar dari fitnah, gunjingan dan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara tentang akta nikah jika permasalahan kasus yang penulis teliti ini awalnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka pernikahan di bawah tangan, dan tidak tercatat buku akta nikah. Pernikahan tersebut diulang di hadapan Kantor Urusan Agama, maka status akta nikah janda akan diakui sah, dan resmi sesuai syariat Islam dan Hukum Negara. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari janda tentang hukum pernikahan menurut hukum Islam dan hukum negara, serta kurangnya profesionalitas pejabat yang berwenang memberikan pengetahuan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi pihak yang ingin menikah, agar pernikahan itu sah dan resmi menurut syariat Islam dan Hukum Negara.

## ABSTRACT

This script entitled "Wedding Widow Behavior In Kampung Kapau Kenagarian Kambang Timur District Lengayang Pesisir Selatan Regency. Written by. Fajria Hamdani. Nim. 312.221. Writing this thesis backed by the existence. Repetition of marriage that describes the situation and condition of the problem under study is the occurrence of re-wedding after the first marriage is completed. Basically re-marriage should not be deliberately done, there must be a cause that is one of them at the first marriage not with a legal guardian, and not in the Office of Religious Affairs (KUA) Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan Regency. The formulation of the problem in this script research is how the analysis of Islamic law against the repetition of the widow marriage contract and how the status of marriage deed if there is a repetition of the widow marriage contract in the presence of the marriage certificate officer of the religious affairs office (PPN-KUA). The type of research used in this thesis is field research (Field Research). This research is a descriptive research that describes the objective results of the circumstances encountered in the field and analyzed according to Islamic law and conducted with the results of interviews and then processed again by the author. From the results of research shows that the analysis of Islamic law against the repetition of the widow marriage contract by law syar'i the implementation of the marriage contract widow, because it has fulfilled harmonious and the requirements of the marriage does not have the book of marriage certificate is not recorded in the civil notebook, so do repetition akad married for reasons of caution (ihtiyath), although not void, to avoid slander, gossip and from things that are not desirable. While the marriage certificate if the case of the author is not initially recorded in the Office of Religious Affairs (KUA). Then the marriage is under the hands, and not recorded books of marriage deed. The marriage is repeated before the Office of Religious Affairs, the status of the marriage certificate will be recognized legally, and officially according to Islamic law and State Law. This can happen because of the lack of knowledge and understanding of widows about the marriage law according to Islamic law and state law, and lack of professionalism of officials authorized to provide knowledge to the public, so that the public can find out what the provisions should be equipped parties who want to get married , in order for the marriage to be legitimate and official according to the Shari'a of Islam and State Law.